

**SILABUS
DAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

**MATA KULIAH
UU PERIKANAN DAN KELAUTAN
(PIK6413)**



**PROGRAM STUDI OSEANOGRAFI
JURUSAN ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2018**

SILABUS MATA KULIAH

**UU PERIKANAN DAN KELAUTAN
(PIK6413)**

TIM PENGAJAR :

- 1. Farid Yasidi, M.Sc**
- 2. Dedy Oetama, M.Si**
- 3. Abdul Muis Balubi, M.P**

**PROGRAM STUDI OSEANOGRAFI
JURUSAN ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2018**

1. **Mata Kuliah** : Undang-Undang Perikanan dan Kelautan
2. **Kode Mata Kuliah** : PIK6413
3. **Semester** : 2 (Dua)
4. **SKS** : 2 (2-0)
5. **Fakultas** : Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
6. **Jurusan / Program Studi** : Ilmu Kelautan / Oseanografi
7. **Mata Kuliah Prasyarat** : -
8. **Deskripsi Mata Kuliah** : Mahasiswa dapat memperoleh seperangkat ilmu pengetahuan tentang pandangan hukum atas pelanggaran peraturan perundangan, dan peraturan perikanan dibidang kelautan dan perikanan. Peraturan perikanan meliputi peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota, hingga peraturan desa serta kearifan lokal. Mata kuliah ini berisi tentang seputar hukum laut di Indonesia maupun Internasional, kebijakan konservasi di Indoensia, pemanfaatan ZEE, dan Rencana tata riuang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, sampai dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia

9. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:

Setelah mengikuti mata kuliah UU Perikanan dan Kelautan, mahasiswa dapat memahami undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia.

10. Bahan Kajian

Bahan kajian pada mata kuliah UU Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan
2. Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan
3. Pengaturan jalur penangkapan ikan dan jalur pelayaran
4. Pengelolaan pemanfaatan penangkapan ikan, sistem perizinan pengawasan, dan sanksi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Zonasi Ekonomi Eksklusif (ZEE)
6. Perlindungan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan
7. Organisasi kelautan dan perikanan dan sistem penyuluhan perikanan
8. Kajian UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
9. Konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
10. Hukum pengelolaan lingkungan kelautan dan perikanan
11. Rencana tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
12. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan terluar
13. Pengembangan usaha perikanan
14. Penggunaan tenaga kerja asing dibidang pemanfaatn sumber daya kelautan dan perikana
15. Simulasi perumusan Undang-Undang dan Peraturan Perikanan

11. Referensi

1. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Perikanan dan Angka Kreditnya. Jakarta
2. Barani, H.M., 2005. Standar Operasi dan Prosedur Pengawasan Penangkapan Ikan. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
3. Dahuri, R., 2001. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta. 21 hal.
4. Dahuri, R., N. Prasmadji, 2002. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.06/MEN/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan yang Masuk ke Wilayah Republik Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.
5. Dahuri, R., N. Prasmadji, 2004. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : .Kep. 02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta,. 34 hal.
6. Muhamad, F., S. Yusuf, 2011. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.18/MEN/2010 tentang Log Book Penangkapan Ikan. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 35 hal.
7. Muhamad, F., P. Akbar, 2011. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.
8. Muhamad, F., P. Akbar, 2011. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta. 15 hal.
9. Numberi, F., 2007. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
10. Numberi, F., 2008. Sinkronisasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Evaluasi Program Kegiatan 2008 dan Rencana Kegiatan 2009. DKP, Jakarta.
11. Numberi, F., N. Prasmadji, 2007. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 11 hal.

12. Soeharto, 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta.
13. Soekarnoputri, M., & B. Kesowo, 2002. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Sistem Usaha Perikanan. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.
14. Soekarnoputri, M., & B. Kesowo, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perikanan Daerah. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.
15. Soekarnoputri, M., & B. Kesowo, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.
16. Soekarnoputri, M., & B. Kesowo, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta. 25 hal.
17. Yudhoyono, S.B., & H. Awaludin, 2006. Peraturan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Jakarta. 31 hal.
18. Yudhoyono, S.B., H. Awaludin, 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jakarta.
19. Yudhoyono, S.B., 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. 107 hal.
20. Yudhoyono, S.B., A. Mattalatta, 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. 75 hal.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

UU PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK6413)

TIM PENGAJAR :

- 1. Farid Yasidi, M.Sc**
- 2. Dedy Oetama, M.Si**
- 3. Abdul Muis Balubi, M.P**

**PROGRAM STUDI OSEANOGRAFI
JURUSAN ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2018**

1. **Mata Kuliah** : Undang-Undang Perikanan dan Kelautan
2. **Kode Mata Kuliah** : PIK6413
3. **Semester** : 2 (Dua)
4. **SKS** : 2 (2-0)
5. **Fakultas** : Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
6. **Jurusan / Program Studi** : Ilmu Kelautan / Oseanografi
7. **Mata Kuliah Prasyarat** : -

Pertemuan ke-	Kemampuan akhir yang direncanakan	Indikator	Bahan kajian	Metode pembelajaran	Waktu pembelajaran	Tugas mahasiswa	Indikator penilaian	Bobot nilai (%)	Reff No-
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>
1 dan 2	Mampu menjelaskan kebijakan dan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> o Mahasiswa dapat mengetahui perencanaan pembangunan nasional o Mahasiswa dapat menelaah dan memahami isi pasal-pasal dalam UU No. 17 tahun 2007 o Mahasiswa dapat mengetahui UU No. 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025 	<ul style="list-style-type: none"> o Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan o Perencanaan pembangunan nasional dibidang kelautan dan perikanan 	Discovery learning	2 x 100 menit	Quiz	Tes tertulis	2 x 5	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Mahasiswa dapat menjelaskan undang-undang republik Indonesia No. 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunannasional ○ Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan ○ Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan ○ Mahasiswa dapat menjelaskan sistem evaluasi keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan 							
3	Mampu menceritakan pengaturan jalur penangkapan ikan dan jalur pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan UU RI No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran ○ Mahasiswa dapat menjelaskan daerah penangkapan ikan (<i>fishing ground</i>) dan isi pasal Undang-undang No. 17 tahun 2007 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Undang-undang RI No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran ○ Daerah penangkapan ikan (<i>fishing ground</i>) 	Discovery learning	100 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Quiz - Tugas presentasi literatur review 	Tes tertulis	5	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Mampu menjelaskan pengelolaan pemanfaatan penangkapan ikan, sistem perizinan, pengawasan, dan sanksi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan UU RI No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ○ Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan perikanan RI No. 54 tahun 2002 tentang usaha perikanan ○ Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan menteri Kelautandan Perikanan No. 02/MEN/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI ○ MahasiswadapatmenjelaskankeputusanmenteriKelautandanPerikanan RI No. KEP.02/MEN/2002 tentangpedomanpelaksanaanpengawasanpenangkapan ikan ○ MahasiswadapatmenjabarkanKeputusanMenteriKelautandanPerikanan RI No. KEP.03/MEN/2002 tentang Log Book Penangkapandanpengangkutan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ UU RI No. 8 TH. 1981 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ○ Peraturan Perikanan RI Nomor 54 Tahun 2002 tentang usaha perikanan ○ Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan No.: 02/MEN/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI ○ Keputusan MenteriKelautandan Perikanan RI No: KEP.02/MEN/2002 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan 	Discovery learning	100 menit	Quiz	Tes tertulis	5	2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			<ul style="list-style-type: none"> o Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No: KEP.03/MEN/2002 tentang log book penangkapan dan pengangkutan ikan 			-			
5	Mampu mendeskripsikan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	<ul style="list-style-type: none"> o Mahasiswa dapat menjelaskan UU RI No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia o Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan perikanan No. 15 tahun 1984 tentang pengelolaan sumber daya di ZEE Indonesia o Mahasiswa dapat menjelaskan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.60/MEN/2001 tentang penataan penggunaan kapal perikanan di ZEEI 	<ul style="list-style-type: none"> o UU RI No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia o Peraturan perikanan No. 15 tahun 1984 tentang pengelolaan sumber daya di ZEE Indonesia o Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.60/MEN/2001 tentang penataan penggunaan kapal perikanan di ZEEI 	Ceramah dan small group discussion	100 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Quiz - Tugas presentasi literatur review 	Tes tertulis	5	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Mampu menjelaskan tentang perlindungan potensi sumber daya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan UU RI No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan ○ Mahasiswa dapat menjelaskan tata cara penyelenggaraan system karantina ikan ○ Mahasiswa dapat menjelaskan syarat-syarat organisme yang dikarantina 	<ul style="list-style-type: none"> ○ UU RI No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan ○ Tata cara penyelenggaraan system karantina ikan ○ Syarat-syarat organisme yang dikarantina 	Ceramah dan small group discussion	100 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Quiz - Tugas presentasi literatur review 	Tes tertulis	10	1, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 20
7	Mampu menjelaskan organisasi kelautan dan perikanan dan sistem penyuluh perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mahasiswa dapat menjelaskan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan Indonesia ○ Mahasiswa dapat menjelaskan UU RI No. 6 Th. 1996 tentang perairan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengelolaan potensi kelautan dan perikanan Indonesia ○ UU RI No. 6 Th. 1996 tentang perairan Indonesia 	Discovery learning	100 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Quiz - Tugas presentasi literatur review 	Test tertulis	5	1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20
8	UJIAN TENGAH SEMESTER								
9	Mampu memahami kajian undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mahasiswa dapat menjelaskan konsep lahirnya undang-undang Nomor 31 tahun 2004 ○ Mahasiswa dapat menelaah dan menjelaskannya seluruh pasal undang-undang nomor 31 tahun 2004 UU RI N). 8 TH 1981 tentang kitab undang-undang hokum pidana 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Konsep lahirnya undang-undang Nomor 31 tahun 2004 ○ Telaah dan penjelaskannya seluruh pasal undang-undang nomor 31 tahun 2004 UU RI N). 8 TH 1981 tentang kitab undang-undang hokum pidana 	Discovery learning	100 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Quiz - Tugas presentasi literatur review 	Tes tertulis	10	1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Mampu menceritakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none"> o Mahasiswa dapat menjelaskan UU RI NO.5 TH. 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya o Mahasiswa dapat menjelaskan persyaratan ekosistem yang dikoservasi 	<ul style="list-style-type: none"> o UU RI NO.5 TH. 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya o Persyaratan ekosistem yang dikoservasi 	Discovery learning	100 menit	Quiz	Tes tertulis	10	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15
11	Mampu menceritakan hukum pengelolaan lingkungan kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> o Mahasiswa dapat menjelaskan UU RI NO.23 TH.1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup o Mahasiswa dapat menjelaskan pengelolaan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria 	<ul style="list-style-type: none"> o UU RI NO.23 TH.1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup o Pengelolaan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria 	Ceramah dan small group discussion	100 menit	- Quiz - Tugas makalah kelompok	Tes tertulis	10	1, 2, 5, 6, 9, 11, 16, 18
12	Mampu menjelaskan rencana atarung laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> o Mahasiswa dapat memahami UU RI NO. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang o Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pesisir dan laut sebagai kawasan budidaya produktif o Mahasiswa dapat menjelaskan pengembangan kolam air tawar sebagai favorit perikanan andarat (perairan umum) 	<ul style="list-style-type: none"> o UU RI NO. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang o Pesisir dan laut sebagai kawasan budidaya produktif o Pengembangan kolam air tawar sebagai favorit perikanan andarat (perairan umum) 	Ceramah dan small group discussion	100 menit	- Quiz - Tugas makalah kelompok	Testertulis	10	6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Mampu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pulau terluar	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mahasiswa dapat memahami UU RI NO.27 TH. 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil ○ Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan presiden No. 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar UU RI NO. 8 TH. 1981 tentang kitab undang-undang hokum pidana (KUHP) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ UU RI NO.27 TH. 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil ○ Peraturan presiden No. 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar UU RI NO. 8 TH. 1981 tentang kitab undang-undang hokum pidana (KUHP) 	Ceramah dan small group discussion	100 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Quiz - Tugas makalah kelompok 	Tes tertulis	10	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
14	Mampu mendeskripsikan penggunaan tenaga kerja asing dibidang pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mahasiswa dapat menjelaskan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-789/MEN/1985 tentang pembatasan penggunaan tenaga kerja warga Negara asing pendatang ○ Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan menteri TenagaKerja RI Nomor: PER.03/MEN/1990 tentang pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja WNA pendatang 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-789/MEN/1985 tentang pembatasan penggunaan tenaga kerja warga Negara asing pendatang ○ Peraturan menteri Tenaga Kerja RI Nomor: PER.03/MEN/1990 tentang pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja WNA pendatang 	Ceramah dan small group discussion	100 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Quiz - Tugas makalah kelompok 	Testertulis	5	1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Mampu menceritakan simulasi perumusan undang-undang dan peraturan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> o Mahasiswa dapat menjelaskan sistem kerja perikanan dan merumuskan kebijakan bidang kelautan dan perikanan o Mahasiswa dapat menjelaskan sistem kerja DPR dalam membahas rancangan peraturan perundangan o Mahasiswa dapat menjelaskan penganeguhan peraturan perundangan oleh perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> o Sistem kerja perikanan dalam merumuskan hukum dan kebijakan bidang kelautan dan perikanan o Sistem kerja DPR dalam membahas rancangan peraturan perundangan 	Ceramah dan small group discussion	100 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Quiz - Tugas makalah kelompok 	Tes tertulis	10	1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20
16	UJIAN AKHIR SEMESTER								

REFERENSI

1. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Perikanan dan Angka Kreditnya. Jakarta
2. Barani, H.M., 2005. Standar Operasi dan Prosedur Pengawasan Penangkapan Ikan. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
3. Dahuri, R., 2001. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta. 21 hal.
4. Dahuri, R., N. Prasmadji, 2002. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.06/MEN/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan yang Masuk ke Wilayah Republik Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.
5. Dahuri, R., N. Prasmadji, 2004. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : .Kep. 02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta., 34 hal.
6. Muhamad, F., S. Yusuf, 2011. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.18/MEN/2010 tentang Log Book Penangkapan Ikan. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 35 hal.

7. Muhamad, F., P. Akbar, 2011. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.
8. Muhamad, F., P. Akbar, 2011. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta. 15 hal.
9. Numberi, F., 2007. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
10. Numberi, F., 2008. Singkronisasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Evaluasi Program Kegiatan 2008 dan Rencana Kegiatan 2009. DKP, Jakarta.
11. Numberi, F., N. Prasmadji, 2007. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 11 hal.
12. Seoharto, 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta.
13. Soekarnoputri, M., & B. Kesowo, 2002. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Sistem Usaha Perikanan. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.
14. Soekarnoputri, M., & B. Kesowo, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perikanan Daerah. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.
15. Soekarnoputri, M., & B. Kesowo, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.
16. Soekarnoputri, M., & B. Kesowo, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta. 25 hal.
17. Yudhoyono, S.B., & H. Awaludin, 2006. Peraturan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Jakarta. 31 hal.
18. Yudhoyono, S.B., H. Awaludin, 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jakarta.
19. Yudhoyono, S.B., 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. 107 hal.
20. Yudhoyono, S.B., A. Mattalatta, 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. 75 hal.